



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2014 - 2034**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perwujudan Sistem Transportasi yang efektif dan efisien perlu disusun dokumen Tataran Transportasi Wilayah, sebagai acuan dalam pengembangan jaringan transportasi wilayah secara terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional, tataran transportasi wilayah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 - 2034;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multi Moda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);

16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 001);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0070) ;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATARAN
TRANSPORTASI WILAYAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 -2034.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
6. Pelayanan transportasi adalah jasa yang dihasilkan oleh penyedia jasa transportasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa transportasi.
7. Jaringan transportasi adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan/kawasan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk suatu kesatuan untuk keperluan penyelenggaraan transportasi.
8. Jaringan pelayanan transportasi adalah susunan rute-rute pelayanan transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan. L

9. Jaringan prasarana transportasi adalah serangkaian simpul yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan.
10. Ruang lalu lintas adalah sesuatu ruang gerak sarana transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas untuk mendukung keselamatan dan kelancaran transportasi. Wujud dari ruang lalu lintas berupa ruang lalu lintas jalan, jalan rel, alur pelayaran dan jalur penerbangan. Khusus untuk ruang lalu lintas jalan disamping untuk lalu lintas kendaraan juga untuk lalu lintas orang dan hewan.
11. Simpul adalah suatu tempat yang berfungsi untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, mengatur perjalanan sarana transportasi serta pemaduan antar moda. Wujud dari simpul berupa terminal transportasi jalan, terminal perairan pedalaman, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut dan bandar udara.
12. Simpul transportasi adalah suatu tempat yang berfungsi untuk kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, mengatur perjalanan serta tempat perpindahan intramoda dan antarmoda.
13. Simpul transportasi wilayah adalah simpul yang melayani pergerakan yang bersifat wilayah atau antar kabupaten/kota dan regional.
14. Tatravail adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi sungai dan danau; transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, dan transportasi pipa yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antarsimpul atau kota wilayah, dan dari simpul atau kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya.
15. Transportasi antarmoda adalah transportasi penumpang dan/atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan.
16. Transportasi intramoda adalah transportasi penumpang dan/atau barang yang menggunakan lebih dari satu jenis sarana dalam satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan.
17. Transportasi multimoda adalah transportasi barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda transportasi yang berbeda atas dasar suatu kontrak yang menggunakan dokumen transportasi multimoda dari suatu tempat barang diterima oleh operator transportasi multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penerimaan barang tersebut.
18. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
19. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. 

20. Jaringan transportasi adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan transportasi untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.
21. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
22. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan dan jadwal yang tetap meskipun tidak terjadwal.
23. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
24. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik dan turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayanan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai perpindahan antar moda transportasi.
25. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
26. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk angkutan penyeberangan.
27. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
28. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
29. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
30. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
31. Rute penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan. L

32. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
33. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
34. Bandar Udara Internasional adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.
35. Bandar Udara Pengumpul (hub) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
36. Bandar Udara Pengumpan (*spoke*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Tataran Transportasi Wilayah Provinsi NTT Tahun 2014-2034.

Pasal 3

- (1) Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan panduan pengembangan jaringan transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur bagi para pemangku kepentingan untuk kurun waktu 2014-2034.
- (2) Dokumen Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I. Pendahuluan;
 - b. Bab II. Kondisi Transportasi Saat ini dan Masa Mendatang, Integrasi Tatarwil Provinsi NTT Tahun 2014-2034 dalam Sistrapas;
 - c. Bab III. Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, Arah dan Program Pengembangan Jaringan Transportasi;
 - d. Bab IV. Penutup.
- (3) Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. *L*

Pasal 4

Tataran Transportasi Wilayah disusun dalam horizon dan periode waktu 20 (dua puluh) tahun serta diadakan kaji ulang paling sedikit 1 kali dalam periode 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Simpul dan ruang lalu lintas pada Tataran Transportasi Wilayah terdiri atas :

- a. Transportasi jalan dengan simpul berupa terminal tipe B dan terminal angkutan barang pengumpan serta jaringan jalan provinsi;
- b. Transportasi penyeberangan dengan simpul berupa pelabuhan penyeberangan lintas provinsi dan antar kota dan jaringan pelayanan angkutan penumpang dan barang lintas penyeberangan antar provinsi dan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota;
- c. Transportasi laut dengan simpul berupa pelabuhan umum regional, jaringan dan trayek dalam negeri, trayek pengumpan dalam negeri, trayek perintis dengan dukungan sarana dan prasarana keselamatan pelayaran;
- d. Transportasi udara dengan simpul berupa bandar udara bukan pusat penyebaran dengan klasifikasi C dan jaringan pelayanan rute pengumpan.

Pasal 6

Koordinasi pelaksanaan Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan program pengembangan jaringan transportasi pada Tataran Transportasi Wilayah dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Tingkat Provinsi dan stakeholders terkait di Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Terhadap hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program pengembangan jaringan transportasi pada Tataran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. L

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 04 FEBRUARI 2014

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *l*



Frans Lebu Raya
FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 4 FEBRUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *mp*



Fransiskus Salem
FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014
NOMOR 008

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 8 TAHUN 2014
TANGGAL : 04 FEBRUARI 2014

TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH (TATRAWIL)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014-2034

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan. Pembangunan sektor transportasi diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perwujudan sistem transportasi yang efektif dan efisien menghadapi berbagai tantangan, peluang dan kendala sehubungan dengan adanya perubahan lingkungan yang dinamis seperti otonomi daerah, globalisasi ekonomi, perubahan perilaku permintaan jasa transportasi, kondisi politik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepedulian pada kelestarian lingkungan hidup serta adanya keterbatasan sumber daya. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, tataran transportasi wilayah perlu terus ditata dan disempurnakan dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga terwujud keterpaduan antar dan intra moda transportasi, dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan, tuntutan masyarakat serta perekonomian nasional dan internasional dengan memperhatikan kelaikan sarana dan prasarana transportasi.

Berdasarkan kondisi seperti yang disebutkan di atas dan dengan memperhatikan perkiraan perubahan pola aktivitas, pola pergerakan, serta peruntukan lahan, maka perlu disusun dokumen Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) yang berfungsi sebagai pedoman atau acuan untuk pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang memfasilitasi pemindahan orang dan/atau barang antar simpul atau kota wilayah dan dari simpul kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan dokumen Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) adalah sebagai acuan penyelenggaraan transportasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. SISTEMATIKA

Dokumen Tatrawil Provinsi NTT Tahun 2014-2034 terdiri dari :

- Bab I. Pendahuluan,
- Bab II. Gambaran kondisi transportasi saat ini dan masa mendatang, Integrasi Tatrawil Provinsi NTT Tahun 2014-2034 dalam Sistranas.
- Bab III. Visi, misi, kebijakan, strategi, Arahan dan program pengembangan jaringan transportasi wilayah.
- Bab IV. Penutup.

BAB II
KONDISI KINERJA TRANSPORTASI NTT SAAT INI DAN MASA
MENDATANG

A. KONDISI SAAT INI

1. Kinerja Transportasi Secara Umum

a. Keselamatan

Tingkat keselamatan transportasi jalan relatif masih rendah, terlihat pada angka kecelakaan yang masih tinggi pada tahun 2013 yang mencapai 1119 kejadian kecelakaan dengan korban meninggal dunia mencapai 426 jiwa yang umumnya disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan dan prasarana jalan.

Keselamatan transportasi penyeberangan, laut dan udara relatif baik hanya saja pada transportasi laut terdapat 23 musibah di laut dengan jumlah korban hilang sebanyak 5 orang.

b. Aksesibilitas

Di Provinsi NTT memiliki panjang jalan Nasional: 1.407 Km dengan kondisi 90% mantap, Jalan Strategis Nasional: 1.104 Km, dengan kondisi 40% mantap dan Jalan Provinsi: 1.314 Km dengan kondisi 40% mantap serta Jalan Kabupaten/Kota ± 13.000 Km. Jumlah ruas jalan Nasional dan Provinsi di NTT adalah 228 ruas jalan. Dari kondisi yang ada masih menunjukkan bahwa akses menuju perdesaan masih relatif rendah oleh karena kualitas dan kuantitas prasarana jalan.

Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini memiliki 20 (dua puluh) Pelabuhan Penyeberangan yaitu ada 14 (empat belas) pelabuhan yang sudah dibangun yaitu Pelabuhan Bolok (I dan II)-Kupang, Kalabahi-Alor, Waingapu-Sumba Timur, Aimere-Ngada, Labuan Bajo-Manggarai Barat, Marapokot-Nagekeo, Waikelo-Sumba Barat Daya, Nangakeo (Ende), Teluk Gurita (Belu), Waibalun-Flotim, Sabu Seba-Sabu Raijua, Waijarang-Lembata, dan Pantai Baru-Rote Ndao; serta Pelabuhan Hansisi-Kupang (menunggu serah terima untuk dioperasikan). Pelabuhan yang sementara dibangun/dikembangkan yaitu Pelabuhan Baranusa (Alor), Waiwerang (Flores Timur), Solor (Flores Timur), Ndao (Rote Ndao), Sabu Seba (Sabu Raijua) dan Kewapante (Sikka), Pemana (Sikka).

Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini sudah memiliki 73 pelabuhan laut yang terdiri atas : 1 Pelabuhan Utama (Pelabuhan Tenau), 9 Pelabuhan Pengumpul (Pelabuhan Laut Ippi, Larantuka, Labuan Bajo, Balauring, Lorens Say-Maumere, Maritaing, Waingapu, Waiwadan dan Wini) dan 63 Pelabuhan Pengumpan (Pelabuhan Laut Baranusa, Kalabahi, Atapupu, Ende, Paitoko, Lembata, Reo, Komodo, Marapokot, Seba, Wuring, Waikelo, dan Mamboro, Dulionong, Kabir, Kolana, Moru, Maurole, Pulau Ende, Lamakera, Menanga, Terong, Waiwerang, Tabilota, Nunbaun Sabu, Batubao, Naikliu, Lewoleba, Wulandoni, Pulau Mules, Robek, Bari, Rinca, Nangalili, Mborong, Nanga Baras, Waiwole, Pota, Riung, Aimere, Maumbawa, Waebela, Ba'a, Batutua, Ndao, Oelaba, Papela, Biu, Raijua, Hepang, Paga, Palue, Pemana, Sukun, Binanatu, Rua, Pero, Baing, Gonggi, Pelra Waingapu, Pulau Salura, Boking dan Kolbano).

Terdapat 1 Bandar Udara Internasional Regional Kelas I dengan tingkat pelayanan pengumpul skala sekunder, yaitu Bandar Udara El Tari Kupang. Saat ini Bandar Udara El Tari Kupang

memiliki panjang landasan 2.500 meter dan lebar 45 yang dapat didarati pesawat berukuran besar seperti B 737-900, BOING-900 ER dan AIRBUS A.320.

Bandar Udara Domestik dengan tingkat pelayanan pengumpul skala tersier, ada 4 (empat) yaitu Bandar Udara Frans Seda (Maumere), dengan panjang landasan sudah mencapai 1.850 meter dan lebar 30 meter sudah dilayani pesawat berukuran B 737-300; Bandara Umbu Mehang Kunda (Waingapu), dengan panjang landasan sudah mencapai 1.850 meter dan lebar 30 meter sudah dilayani pesawat berukuran B 737-300; Bandara H. Hasan Aroeboesman (Ende), dengan panjang landasan sudah mencapai 1.850 meter dan lebar 30 meter sudah bisa dilayani pesawat berukuran B 737-300; dan Bandara Haliwen (Atambua); dengan panjang landasan sudah mencapai 1.400 meter dan lebar 30 meter sudah dilayani pesawat berukuran F-50.

Bandar Udara Domestik dengan tingkat pelayanan skala pengumpan, ada 9 (sembilan) yaitu Bandar Udara Komodo (Labuan Bajo), Frans Sales Lega (Ruteng), Tambolaka (Waikabubak), Gewayantana (Larantuka), Mali (Alor), DC. Saudale (Rote Ndao), Tardamu (Sabu), Soa (Ngada), dan Bandar Udara Wunopito (Lembata).

Bandar Udara Komodo Labuan Bajo, dalam rangka mendukung pariwisata, saat ini panjang landasan sudah mencapai 1.850 meter dan lebar 30 meter sudah bisa dilayani pesawat berukuran B 737-300.

c. Keterpaduan

Keterpaduan jaringan prasarana dan pelayanan transportasi saat ini belum terwujud, antara lain dapat dilihat dari pelayanan angkutan penumpang umum antara moda yang satu dengan moda lainnya menyebabkan masyarakat yang melakukan perjalanan beberapa kali berganti kendaraan dan belum dapat dilayani oleh angkutan terusan. Selain itu perpindahan intramoda baik dalam kota, maupun antar kota belum dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Demikian juga keterpaduan dalam jaringan prasarana seperti pelabuhan, terminal bandar udara dan pengaturan jadwal masih belum memuaskan.

d. Kapasitas

Kapasitas sarana transportasi jalan dalam pelayanan penumpang relatif mencukupi terutama pada angkutan umum perkotaan.

Pada transportasi penyeberangan kapasitas dermaga relatif mencukupi,

demikian juga pada transportasi laut, hal yang sama pada transportasi udara, kapasitas tempat duduk yang tersedia untuk penerbangan berjadwal domestik relatif mencukupi.

e. Teratur

Pada transportasi jalan, ketidakteraturan pelayanan masih sering terjadi, yang disebabkan oleh faktor tata guna lahan. Pada ruas-ruas tertentu khususnya di perkotaan terdapat aktifitas di badan jalan yang sangat mengganggu aktifitas lalu lintas.

Pelayanan transportasi penyeberangan jadwalnya telah ditetapkan dan relatif sesuai.

Pada transportasi laut, keteraturan pelayanan kapal telah ditetapkan namun belum seluruhnya terlaksana secara teratur, disamping banyaknya kapal yang melayani secara tramper.

Keteraturan pada transportasi udara secara umum relatif baik dengan tingkat on time performance (OTP) rata-rata di atas 85%.

f. Lancar dan cepat

Kelancaran lalu lintas jalan masih relatif kurang. Hal ini tidak terlepas dari terbatasnya daya dukung dan kondisi permukaan jalan serta rendahnya disiplin pemakai jalan terutama di perkotaan. Kelancaran lalu lintas di perkotaan khususnya pada jam-jam sibuk hanya dapat dicapai dengan kecepatan 30 – 40 km/jam.

Pada transportasi penyeberangan relatif lancar. Kecepatan kapal penyeberangan sebagian besar kurang dari 15 knot, dengan jarak pelayaran relatif jauh.

Pada transportasi laut dan udara kelancaran arus lalu lintas relatif lebih baik.

g. Mudah dicapai

Kemudahan untuk melakukan perjalanan pada umumnya sudah memadai terutama di perkotaan, sedangkan pada kawasan bukan perkotaan masih perlu peningkatan layanan untuk angkutan luar kota dan perdesaan.

h. Tepat Waktu

Jadwal waktu kedatangan dan keberangkatan bus belum ditetapkan, sedangkan kapal penyeberangan serta kapal laut telah ditetapkan dalam satu time table, akan tetapi belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Sedangkan pada transportasi udara relatif dapat dipenuhi.

i. Nyaman

Kenyamanan pelayanan angkutan jalan masih jauh dari yang diharapkan, baik untuk angkutan perkotaan maupun angkutan antar kota dalam provinsi. Begitu juga pada angkutan penyeberangan dan angkutan laut masih relatif rendah dimana masih banyak penumpang yang terpaksa menggunakan dek kendaraan bagi angkutan penyeberangan dan tangga – tangga kapal untuk angkutan laut.

Sedang kenyamanan pada transportasi udara relatif memuaskan baik dilihat dari alternatif pelayanan dan ketersediaan fasilitas.

j. Tarif terjangkau

Tarif angkutan umum perkotaan relatif terjangkau oleh masyarakat. Tarif angkutan umum perkotaan diberlakukan dengan sistem tarif datar (flat fare), namun untuk angkutan umum antar kota diterapkan tarif berdasarkan jarak.

Tarif angkutan penyeberangan ditetapkan oleh pemerintah dan relatif terjangkau masyarakat. Angkutan perintis memperoleh subsidi atau PSO.

Tarif penumpang transportasi laut yang ditetapkan oleh pemerintah relatif terjangkau, tarif angkutan barang sesuai dengan mekanisme pasar.

Pada transportasi udara, pemerintah hanya menetapkan tarif dasar dan tarif batas atas untuk tarif penumpang dalam negeri kelas ekonomi, sedangkan tarif batas bawah diserahkan kepada mekanisme pasar.

k. Tertib

Tingkat ketertiban berlalu lintas pada transportasi jalan masih sangat memprihatinkan, terlihat dari masih sering terjadinya pelanggaran terhadap rambu dan peraturan lalu lintas. Pada transportasi laut, tingkat ketertiban berlalu lintas masih perlu

ditingkatkan, terutama pada saat keluar masuknya kapal dan barang di pelabuhan.

1. Aman

Keamanan transportasi jalan masih relatif rendah, terlihat dari masih terjadi tindak kekerasan, perampokan dan pungutan liar di terminal dan di atas kendaraan. Keamanan alur pelayaran transportasi penyeberangan dan laut relatif memadai, namun di lingkungan terminal dan dermaga masih rendah, terlihat dari banyaknya praktek calo dan arogansi tenaga kerja bongkar muat serta kejadian kriminalitas.

Tingkat keamanan pesawat udara dan penumpang di bandar udara relatif tinggi. Tetapi keamanan dalam pelayanan bagasi masih kurang memadai, dilihat dari masih banyaknya penumpang yang mengalami kehilangan barang (bagasi).

m. Polusi rendah

Polusi udara yang ditimbulkan transportasi jalan sangat tinggi. Demikian juga limbah minyak diperairan akibat buangan kapal dan kebisingan yang timbul di sekitar bandar udara belum sepenuhnya dapat diatasi.

n. Efisien

Efisiensi penggunaan sarana angkutan umum perkotaan dan angkutan antar kota dalam provinsi relatif rendah atau berada di bawah faktor muat titik impas dipengaruhi oleh tingkat penggunaan sepeda motor yang sangat tinggi.

Efisiensi penyelenggaraan pelabuhan dan bandara di Nusa Tenggara Timur relatif rendah dan hanya mengutamakan pelayanan semata.

2. Kinerja Per Moda Transportasi

a. Transportasi Antar Moda/Multi Moda

Jaringan pelayanan transportasi antarmoda perkotaan untuk angkutan penumpang maupun barang belum dapat diwujudkan oleh karena belum tersedia infrastruktur yang mendukung pelayanan antar moda.

b. Transportasi Perkotaan

1) Kapasitas jaringan transportasi kota/perkotaan masih sangat terbatas, peningkatan jumlah pergerakan serta kualitas pelayanan tidak sebanding dengan pengembangan jaringan.

2) Transportasi perkotaan masih belum sepenuhnya di kelola oleh kualitas sumber daya yang memadai, norma, standar, acuan dan pedoman yang belum cukup tersedia.

3) Perhatian atas kondisi serta pengembangan sistem transportasi masal masih rendah, tingkat pelayanan angkutan umum masih rendah.

4) Lalu lintas kota/perkotaan banyak diwarnai dengan kemacetan lalu lintas, yang disebabkan oleh keterbatasan jaringan serta tingkat disiplin berlalu lintas.

c. Transportasi Jalan

1) Jaringan jalan masih sangat terbatas, dan pemanfaatan sepenuhnya sesuai dengan fungsi, kelas dan peranan jalan.

2) Angkutan umum transportasi jalan masih belum sepenuhnya di kelola oleh kualitas sumber daya yang memadai, norma, standar, acuan dan pedoman belum sepenuhnya tersedia khususnya yang terkait dengan sistem manajemen, operasi dan pemeliharaan sarana transportasi.

3) Jalan mempunyai keunggulan komparatif dalam menjangkau daerah terpencil dan terisolir, namun jaringan

- jalan masih belum sepenuhnya menjangkau seluruh daerah terisolir dan terpencil.
- 4) Jaringan transportasi jalan masih diorientasikan pada pengembangan jaringan jalan pada daratan, jaringan jalan belum dikembangkan lanjut dalam sistem transportasi gugus pulau/kepulauan.
- d. Transportasi Penyeberangan
- 1) Telah dikembangkan konsep sabuk selatan Indonesia dari Aceh sampai Timor namun pengembangan transportasi penyeberangan belum sepenuhnya diarahkan sebagai salah satu moda alat pemersatu yang menghubungkan seluruh pulau-pulau di wilayah Nusa Tenggara Timur sebagai satu kesatuan jaringan transportasi darat yang utuh.
 - 2) Sarana kapal penyeberangan masih belum sesuai dengan perkembangan jumlah permintaan dan kualitas pelayanan, operasi dan pemeliharaan belum sepenuhnya mengacu pada standar dan pedoman yang ada.
 - 3) Jaringan lintas masih terbatas, tingkat pelayanan transportasi penyeberangan masih relatif rendah khususnya tingkat kenyamanan dan keamanan dan keteraturan terhadap jadwal.
- e. Transportasi Laut
- 1) Keterpaduan pelayanan intra dan antar moda di setiap pelabuhan belum sepenuhnya terlaksana, sehingga perpindahan barang dan penumpang kurang efektif dan efisien.
 - 2) Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi laut belum efektif, sehingga penyediaan kapasitas sarana dan prasarana transportasi laut untuk memenuhi kebutuhan belum serasi dan seimbang.
 - 3) Belum terbentuknya tarif yang dapat menutupi biaya pelayanan (cost recovery) dengan tingkat efisiensi yang rendah.
 - 4) Pelayanan pada daerah tertinggal, terisolir dan kawasan perbatasan melalui subsidi angkutan perintis atau melalui skema public service obligation (PSO) belum terwujud.
 - 5) Penggunaan sarana dan prasarana transportasi laut masih belum optimal dengan tingkat efisiensi rendah sehingga armada nasional belum mampu bersaing dengan armada asing.
- f. Transportasi Udara
- 1) Kapasitas dan produksi transportasi udara sudah sesuai dengan spesifikasi pesawat udara, namun masih perlu ditingkatkan guna mengantisipasi naiknya permintaan.
 - 2) Kondisi keselamatan penerbangan saat ini relatif memadai, namun berbagai peralatan penunjang operasi keselamatan dan keamanan penerbangan masih perlu disesuaikan dengan standar nasional dan internasional.
 - 3) Pelayanan angkutan perintis masih memerlukan subsidi untuk menghubungkan daerah – daerah yang masih belum dapat dilayani oleh moda transportasi lainnya.

B. KONDISI YANG DIHARAPKAN

1. Kinerja Transportasi Secara Umum

a. Keselamatan

Meningkatnya tingkat keselamatan transportasi jalan terutama pada ruas jalan luar kota dan jalan perkotaan di persimpangan, transportasi laut dan penyeberangan pada seluruh perairan di

Nusa Tenggara Timur dan transportasi udara sehubungan dengan meningkatnya lalu lintas penerbangan.

- b. **Aksesibilitas**
Meningkatnya aksesibilitas jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi jalan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur, transportasi penyeberangan, transportasi laut khususnya untuk pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan antar pulau dan perdagangan luar negeri, dan transportasi udara terutama untuk mendukung pariwisata dan daerah perbatasan.
- c. **Keterpaduan**
Meningkatnya keterpaduan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana angkutan umum antara moda yang satu dengan moda lainnya sehingga dapat diwujudkan pelayanan transportasi yang terpadu
- d. **Kapasitas**
Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi jalan dalam pelayanan distribusi penumpang terutama pada pelayanan antar kabupaten. Pengembangan dermaga penyeberangan untuk menghubungkan pulau kecil dan besar di Nusa Tenggara Timur.
Pada transportasi laut terjadi peningkatan armada, fasilitas pelabuhan dan peti kemas.
Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi udara untuk angkutan penumpang berjadwal domestik dan internasional.
- e. **Teratur**
Meningkatnya keteraturan jadwal kedatangan dan keberangkatan pada angkutan jalan, angkutan penyeberangan, transportasi laut, dan transportasi udara, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- f. **Lancar dan cepat**
Meningkatnya kelancaran dan kecepatan arus lalu lintas jalan terutama pada angkutan perkotaan, transportasi penyeberangan, transportasi laut terutama aksesibilitas ke pelabuhan, dan transportasi udara khususnya pelayanan di terminal bandar udara.
- g. **Kemudahan**
Meningkatnya kemudahan untuk melakukan perjalanan dengan didukung adanya informasi jadwal kedatangan dan keberangkatan, penjualan tiket, kendaraan terusan dan alih moda, khusus untuk transportasi laut tersedia juga informasi ruang muatan kapal.
- h. **Tepat Waktu**
Meningkatnya ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan bus, kapal penyeberangan, kapal laut dan pesawat udara, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- i. **Nyaman**
Meningkatnya kenyamanan pelayanan angkutan umum perkotaan/AKDP, transportasi penyeberangan, transportasi laut, dan transportasi udara.
- j. **Tarif terjangkau**
Meningkatnya keterjangkauan tarif angkutan umum perkotaan/AKDP, transportasi penyeberangan, transportasi laut, dan transportasi udara.
- k. **Tertib**

Meningkatnya ketertiban berlalu lintas pada transportasi jalan khususnya angkutan perkotaan sehingga pelanggaran terhadap rambu dan peraturan lalu lintas di jalan dapat diminimalisasi.

1. Aman

Meningkatnya keamanan transportasi jalan, penyeberangan, terutama di terminal dan di atas kendaraan, sehingga tindak kriminal terhadap pengguna jasa dapat diminimalisasi.

Meningkatnya kemampuan keamanan bandar udara sebagai pintu pencegahan tindak kriminalitas internasional.

m. Polusi rendah

Menurunnya tingkat polusi udara yang ditimbulkan oleh transportasi jalan khususnya di wilayah perkotaan, tingkat polusi limbah minyak di perairan akibat buangan kapal, serta tingkat kebisingan di sekitar kawasan bandar udara.

n. Efisien

Meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana angkutan penumpang antar kota, faktor muat kapal penyeberangan, efisiensi penyelenggaraan pelabuhan dan pengoperasian armada nasional sehingga mampu bersaing dengan armada asing.

2. Kinerja Per Moda Transportasi

a. Transportasi Antar Moda/Multi Moda

1) Terwujudnya pelayanan transportasi antarmoda penumpang perkotaan dengan tiket tunggal, peningkatan pelayanan transportasi penumpang dan/atau barang antar moda/multi moda dalam negeri dan luar negeri;

2) Terwujudnya tatanan fasilitas alih muat di simpul transportasi yang mampu mendukung kelancaran kegiatan alih moda;

3) Meningkatnya keterpaduan jaringan pelayanan transportasi antar moda/multi moda utamanya pada simpul-simpul transportasi penyeberangan, laut, dan udara, untuk mendukung pelayanan transportasi antar moda/ multi moda yang efektif dan efisien;

4) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang transportasi antar moda/multi moda;

5) Terwujudnya peraturan perundangan di bidang transportasi antar moda/ multi moda;

6) Terwujudnya kelembagaan untuk pembinaan penyelenggaraan transportasi antar moda/multi moda.

b. Transportasi Perkotaan

1) Meningkatnya keterpaduan pelayanan angkutan umum perkotaan baik intra maupun antar moda, khususnya pengembangan simpul bandar udara dan pelabuhan laut sebagai tempat alih muat;

2) Meningkatnya pengembangan transportasi massal perkotaan sebagai salah satu akselerasi pengurangan kepadatan dan kemacetan lalu lintas di wilayah perkotaan;

3) Meningkatnya ketertiban berlalu lintas guna menjamin kelancaran lalu lintas khususnya pada transportasi perkotaan;

4) Meningkatnya kenyamanan dan keamanan pelayanan angkutan umum perkotaan sebagai salah satu upaya mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum;

- 5) Meningkatnya perhatian dan keberpihakan kepada angkutan umum perkotaan khususnya aspek keselamatan sebagai akibat dari kurang disiplinnya pengemudi angkutan umum;
 - 6) Meningkatnya aksesibilitas angkutan perkotaan khususnya di ibukota provinsi guna memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan;
 - 7) Meningkatnya kapasitas jaringan transportasi perkotaan;
 - 8) Meningkatnya jaringan prasarana guna mengantisipasi meningkatnya permintaan pelayanan angkutan umum perkotaan.
- c. Transportasi Jalan
- 1) Berkembangnya jaringan jalan lintas pada masing-masing pulau yang menghubungkan seluruh kawasan, pusat permukiman dan simpul-simpul transportasi;
 - 2) Terwujudnya standar prasarana dan sarana transportasi jalan sesuai dengan perkembangan kawasan dan kota;
 - 3) Berkembangnya transportasi antar pulau sebagai bagian dari jaringan jalan, khususnya yang dapat diseberangi dalam waktu yang relatif pendek dan merupakan kesatuan angkutan transportasi jalan, melalui angkutan penyeberangan;
 - 4) Meningkatnya keterkaitan dan hubungan pulau-pulau melalui pembangunan jembatan antar pulau sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) Meningkatnya fungsi jalan baik jaringan arteri primer maupun jaringan kolektor primer dan jalan lintas, dengan memperhatikan perkiraan arus penumpang dan barang antar kawasan, antar kota, antara kawasan dan kota, dan antar pulau;
 - 6) Terwujudnya sistem tarif serta subsidi angkutan;
 - 7) Berkembangnya transportasi di daerah terpencil, marginal, terbelakang, terisolir dan kawasan perbatasan melalui angkutan perintis atau skema public service obligation (PSO).
- d. Transportasi Penyeberangan
- 1) Meningkatnya kapasitas transportasi penyeberangan dalam pelayanan distribusi penumpang dan barang secara regional sesuai dengan tingkat kebutuhan;
 - 2) Tersedianya pelayanan pada daerah tertinggal, terpencil, terisolir dan daerah perbatasan yang disubsidi melalui angkutan perintis atau melalui skema public service obligation (PSO);
 - 3) Meningkatnya ketepatan jadwal pelayanan dilihat dari kesesuaian kedatangan dan keberangkatan kapal dengan jadwal;
 - 4) Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas transportasi penyeberangan serta tingkat pemakaian dermaga;
 - 5) Meningkatnya keselamatan transportasi penyeberangan sesuai dengan standar nasional dan internasional;
 - 6) Meningkatnya keamanan pelayaran transportasi penyeberangan baik di dalam kapal, lingkungan terminal, dan dermaga;
 - 7) Meningkatnya kenyamanan penumpang transportasi penyeberangan selama dalam perjalanan;
 - 8) Meningkatnya aksesibilitas pelabuhan penyeberangan
- e. Transportasi Laut

- 1) Meningkatnya keterpaduan pelayanan intra moda dan antar moda/ multi moda di setiap pelabuhan, sehingga perpindahan barang dan penumpang akan semakin efektif dan efisien;
 - 2) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi laut untuk memenuhi kebutuhan melalui efektivitas perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi laut;
 - 3) Terbentuknya tarif yang dapat menutupi biaya pelayanan (cost recovery) dengan tingkat efisiensi yang tinggi;
 - 4) Meningkatnya pelayanan pada daerah tertinggal, terisolir dan kawasan perbatasan melalui subsidi angkutan perintis atau melalui skema public service obligation (PSO);
 - 5) Meningkatnya efisiensi dalam rangka optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana transportasi laut, sehingga armada nasional mampu bersaing dengan armada asing;
 - 6) Meningkatnya ketertiban pelayanan dan pengoperasian sarana dan prasarana. Masyarakat pemakai jasa transportasi, operator (penyelenggara) dan pengawas (regulator) semakin mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) Meningkatnya kecukupan sarana dan prasarana keselamatan pelayaran sesuai ketentuan internasional baik di alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) maupun di alur pelayaran lainnya dalam mendukung keselamatan pelayaran dan kelancaran angkutan laut;
 - 8) Meningkatnya kelancaran pelayanan kapal dan barang di pelabuhan, sehingga dapat menekan ekonomi biaya tinggi;
 - 9) Meningkatnya keamanan di pelabuhan, di kapal dan di laut sesuai ketentuan internasional;
 - 10) Meningkatnya kemudahan masyarakat dan penyelenggara angkutan laut memperoleh informasi melalui media cetak, booklet, internet, dan lain lain;
 - 11) Meningkatnya ketepatan waktu berangkat dan tiba sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sehingga dapat membantu masyarakat merencanakan kegiatannya dengan tepat;
 - 12) Meningkatnya kenyamanan selama dalam perjalanan dan di pelabuhan;
 - 13) Meningkatnya peran transportasi laut dalam negeri melalui penegakan azas cabotage;
 - 14) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di subsektor transportasi laut sesuai dengan perkembangan teknologi dan ketentuan internasional;
 - 15) Meningkatnya peran kelembagaan dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut yang efektif dan efisien.
- f. Transportasi Udara
- 1) Meningkatnya kapasitas dan produksi transportasi udara sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi pesawat udara;
 - 2) Meningkatnya jaringan pelayanan transportasi udara melalui pembebasan dalam penetapan daerah operasi, pemilihan rute, kapasitas dan tarif (kecuali perintis), sehingga terwujudnya mekanisme pasar yang didukung oleh kelayakan investasi;
 - 3) Meningkatnya keselamatan penerbangan dan peralatan penunjang operasi keamanan dan keselamatan

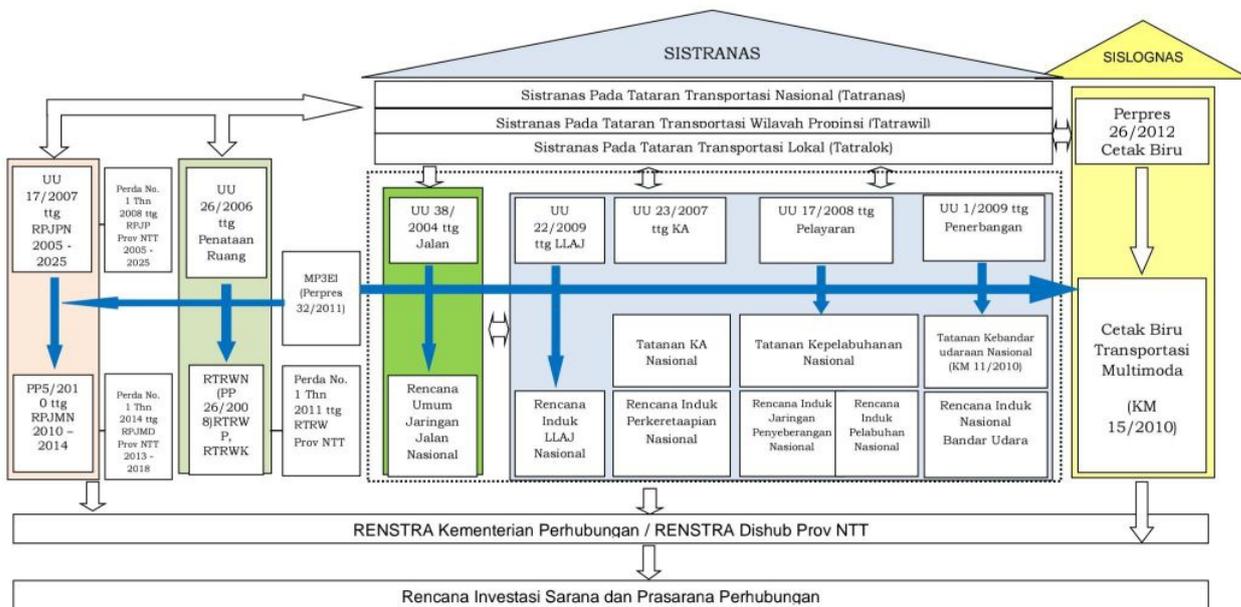
- penerbangan sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- 4) Meningkatnya peran kelembagaan dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan transportasi udara yang efektif dan efisien;
 - 5) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan teknologi penerbangan untuk memenuhi standar nasional dan internasional;
 - 6) Meningkatnya kualitas produk hukum daerah dibidang transportasi yang mengakomodasi berbagai perkembangan yang ada;
 - 7) Meningkatnya pelayanan pada daerah terbelakang, terpencil, terisolir, dan daerah perbatasan melalui subsidi angkutan perintis atau melalui skema public service obligation (PSO).

C. INTEGRASI TATRAWIL PROVINSI NTT TAHUN 2014-2024 DALAM SISTRANAS

Penyelarasan dokumen Tatrawil dalam Sistranas sejalan dengan perkembangan dan dinamika nasional dan lingkungan strategis serta harmonisasi dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta empat peraturan perundang-undangan transportasi, Sistem Logistik Nasional, Cetak Biru Transportasi Antar Moda/Multi Moda mempunyai korelasi yang kuat dengan ekonomi.

Integrasi Tatrawil Provinsi NTT Tahun 2014-2034 dan Tatalok serta dokumen terkait di masing-masing moda transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Integrasi Tatrawil Provinsi NTT 2014-2034 dalam Sistranas



BAB III
VISI, MISI, KEBIJAKAN, STRATEGI ARAH DAN PROGRAM
PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI TAHUN 2014-2034

A. VISI

Visi pengembangan sistem transportasi Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan gambaran kondisi sistem transportasi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2034. Visi pengembangan sistem transportasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dirumuskan berdasarkan tujuan-tujuan pengembangan sistem transportasi yang ingin dicapai. Adapun visi pengembangan sistem transportasi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

“Terselenggaranya transportasi Nusa Tenggara Timur yang efektif, efisien dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional demi terwujudnya Nusa Tenggara Timur yang Sejahtera, Adil dan Demokratis”

- Efektif dalam arti : selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman serta polusi rendah.
- Efisien dalam arti : beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan transportasi nasional.

B. MISI

Perwujudan visi pengembangan sistem transportasi Provinsi Nusa Tenggara Timur ditempuh melalui misi pengembangan sistem transportasi. Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi. Untuk mewujudkan visi di atas, yang menjadi kontinuitas dari arah pengembangan sistem transportasi Nusa Tenggara Timur sampai tahun 2034. Maka misi pengembangan sistem transportasi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1. Menyeimbangkan dan menjaga infrastruktur transportasi antar pulau melalui pendekatan sabuk transportasi antar pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Memperlancar hubungan antar ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten dan provinsi;
3. Memadukan pengembangan transportasi dengan penataan ruang;
4. Mengembangkan fasilitas penyeberangan dan perhubungan laut sebagai tulang punggung transportasi kepulauan;
5. Memperkuat simpul dan mengembangkan fasilitas transportasi udara;
6. Mengembangkan integrasi layanan berbagai moda transportasi;
7. Menciptakan layanan bermutu mendukung sektor pendidikan, budaya dan pariwisata;
8. Mengutamakan angkutan umum dan kendaraan tidak bermotor;
9. Mengharmoniskan sistem transportasi antar kabupaten/kota;
10. Menciptakan citra sistem transportasi yang modern, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi.

C. KEBIJAKAN

1. Umum

Kebijakan umum Tatrawil sebagai berikut :

- a. Peningkatan pelayanan transportasi Nasional dan Wilayah.

- b. Pembinaan keselamatan dan keamanan transportasi.
 - c. Pembinaan pengusaha transportasi.
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penghematan energi.
 - f. Peningkatan penyediaan dana pembangunan transportasi.
 - g. Peningkatan kualitas Aparatur Negara di sektor transportasi.
2. Kebijakan Tatrawil
- 1) Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi Antarmoda/Multimoda
Kebijakan pengembangan transportasi antarmoda/multimoda adalah mewujudkan pelayanan transportasi yang berkesinambungan, tepat waktu dan dapat memberikan pelayanan dari pintu ke pintu.
 - 2) Kebijakan Pengembangan Jaringan Jalan
Kebijakan pengembangan jaringan jalan adalah penyesuaian atau peningkatan fungsi dan tingkat pelayanan atau kapasitas jalan dan angkutan di atasnya.
 - 3) Kebijakan Pengembangan Angkutan Penyeberangan
Kebijakan pengembangan angkutan penyeberangan adalah mewujudkan jaringan pelayanan angkutan penyeberangan yang mampu mendukung pertumbuhan wilayah khususnya pertumbuhan ekonomi.
 - 4) Kebijakan Pengembangan Transportasi Laut
Kebijakan pengembangan transportasi laut adalah mewujudkan sistem transportasi laut yang andal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi provinsi dan nasional.
 - 5) Kebijakan Pengembangan Transportasi Udara
Kebijakan pengembangan transportasi udara adalah mewujudkan sistem transportasi udara yang andal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan provinsi dan nasional.

D. STRATEGI

1. Strategi Pengembangan Antarmoda/Multimoda

Strategi untuk mewujudkan angkutan multimoda sebagai integrasi antar moda angkutan untuk penumpang dan mendukung distribusi barang meliputi :

- a. Mengembangkan konsep angkutan umum di wilayah provinsi meliputi angkutan perkotaan, wilayah (regional) dan perdesaan dalam satu kesatuan pelayanan
- b. Mengembangkan konsep angkutan perkotaan yang melayani pusat kota dan wilayah aglomerasinya yang efisien, ramah lingkungan dan terpadu
- c. Mengupayakan dan memantapkan keterpaduan moda jalan, terminal dengan dermaga penyeberangan
- d. Mengembangkan angkutan regional yang menghubungkan dan memadukan angkutan perkotaan dan perdesaan
- e. Menyiapkan perumusan tentang terminal, simpul transfer, halte dan *bus stop* yang aman dan nyaman
- f. Mengembangkan keterpaduan angkutan jalan, angkutan penyeberangan, angkutan laut dan angkutan udara dalam suatu pelayanan yang terpadu dan efisien.

2. Strategi Pengembangan Transportasi Darat

a. Jaringan Jalan

Strategi untuk peningkatan fungsi dan pelayanan jaringan jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi :

- 1) Menjadikan keselamatan jalan sebagai tujuan utama penyelenggaraan lalu lintas jalan
- 2) Menyeraskan penanganan berbagai moda transportasi jalan terutama menyangkut angkutan umum dan kendaraan tak bermotor
- 3) Mengoptimalkan pelayanan lalu lintas pada seluruh jaringan jalan yang ada melalui sistem informasi/petunjuk arah dan rute yang memadai
- 4) Menghubungkan daerah-daerah yang terisolir dan terpencil terutama pada sekitar kawasan perbatasan antar negara guna meningkatkan aspek keamanan dan aksesibilitas antar negara
- 5) Menyeraskan penataan lalu-lintas dan *traffic management* antar kabupaten/kota
- 6) Merumuskan strategi penanganan simpang-simpang pada berbagai jenis simpang yang ada
- 7) Memperkenalkan prinsip-prinsip pembatasan lalu lintas terutama di daerah perkotaan
- 8) Memprakarsai sistem lalu-lintas yang ramah lingkungan dan hemat energi
- 9) Mengendalikan lalu lintas dan angkutan berat dalam rangka melindungi kerusakan prasarana jalan
- 10) Memperkenalkan sistem parkir di kawasan pusat kota dan pusat kegiatan yang efisien dan mampu meningkatkan pendapatan daerah meliputi *on-street* (parkir di badan jalan) , *off-street* (parkir di bahu jalan) dan *remote parking* (parkir jauh) dan park and ride (parkir dan melanjutkan dengan angkutan umum).

b. Terminal Barang dan Penumpang

- 1) Pembangunan terminal barang dan penumpang untuk mendukung pergerakan barang serta mengintegrasikan dengan simpul transportasi lainnya
- 2) Meningkatkan daya tampung kendaraan di setiap terminal
- 3) Pengembangan fasilitas pendukung di setiap terminal
- 4) Pembangunan fasilitas berupa rest area/kawasan istirahat dengan fasilitas lengkap pada terminal yang ditetapkan sebagai outlet wilayah
- 5) Meningkatkan akses ke terminal
- 6) Memberikan pelayanan kepada pengguna jaringan jalan agar mendapatkan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan dalam melakukan perjalanan ke/dari suatu wilayah.

c. Angkutan Penumpang dan Barang

Strategi untuk mewujudkan angkutan umum sebagai moda prioritas dan pola angkutan barang antar simpul meliputi :

- 1) Mengembangkan konsep angkutan umum di wilayah provinsi meliputi angkutan perkotaan, wilayah (regional) dan perdesaan dalam satu kesatuan pelayanan
- 2) Mengembangkan konsep angkutan perkotaan yang melayani pusat kota dan wilayah aglomerasinya yang efisien, ramah lingkungan dan terpadu

- 3) Mengembangkan konsep angkutan perdesaan yang menjamin akses ke seluruh wilayah perdesaan dan wilayah terisolasi
- 4) Mengembangkan angkutan regional yang menghubungkan dan memadukan angkutan perkotaan dan perdesaan
- 5) Menyiapkan perumusan tentang terminal, simpul transfer, halte dan *bus stop* yang aman, nyaman dan mencerminkan budaya lokal
- 6) Menerapkan *Buy The Service* (prinsip pelayanan angkutan umum, kualitas yang didapat sama dengan biaya yang dibayar) untuk angkutan umum perkotaan dan memperkenalkan *Buy the Service* untuk angkutan kota dalam provinsi (AKDP)
- 7) Menerapkan prioritas angkutan melalui lajur bus (*bus way*) dan jalur bus (*bus lane*)
- 8) Merencanakan sistem sirkulasi barang dalam suatu jaringan lintas dan fasilitas bongkar muat yang terpadu dengan moda transport lain serta membatasi angkutan barang berat, mengutamakan penggunaan angkutan yang sesuai dengan kemampuan prasarana jalan yang ada.

3. Strategi Pengembangan Transportasi Laut

Strategi untuk mewujudkan transportasi laut yang andal dan berkemampuan tinggi meliputi :

- 1) Mengembangkan angkutan laut yang menghubungkan antar pulau-pulau kecil di wilayah kabupaten/kota dan menghubungkan daerah yang terpencil dan terisolir dengan menghubungkan daerah produksi hasil bumi dengan simpul-simpul transportasi pada daerah yang lebih maju
- 2) Meningkatkan peran armada pelayaran nasional, baik untuk angkutan dalam negeri maupun luar negeri dengan memberlakukan azas *cabotage*. Untuk itu diperlukan dukungan perbankan dalam penyediaan kredit murah bagi peremajaan armada
- 3) Mengurangi bahkan menghapus pungutan-pungutan tidak resmi di pelabuhan, sehingga tarif yang ditetapkan otoritas pelabuhan tidak jauh berbeda dengan biaya yang secara riil dikeluarkan pengguna jasa angkutan laut, melalui peningkatan kordinasi bagi semua instansi yang terkait dalam proses bongkar muat barang dan penumpang
- 4) Pemenuhan standar pelayaran internasional untuk peningkatan keselamatan pelayaran, baik selama pelayaran maupun saat berlabuh dan bongkar muat di pelabuhan
- 5) Mengembangkan terminal peti kemas/*Dry port* yang lebih efisien, efektif serta berdaya saing guna meningkatkan arus pergerakan barang ekspor dan import dari dan ke luar wilayah Provinsi NTT.

4. Strategi Pengembangan Transportasi Udara

Strategi untuk mewujudkan transportasi yang andal dan berkemampuan tinggi meliputi :

- 1) Pengembangan fasilitas penerbangan, meliputi *run way*, *taxi way*, *apron* dan terminal
- 2) Memperkuat simpul bandara dengan mengkombinasikan menuju terminal terpadu meliputi : angkutan bus, dan angkutan kota serta mendukung kegiatan komersial dan pariwisata

- 3) Mengembangkan fasilitas kargo dan fasilitas pemrosesan barang guna meningkatkan nilai tambah komoditas
- 4) Mengembangkan penerbangan langsung dengan lebih banyak kota potensi wisatawan, baik melalui penerbangan reguler maupun *charter*.

5. Strategi Pengembangan Penyeberangan

Strategi untuk mewujudkan angkutan penyeberangan sebagai moda angkutan penyeberangan lintas pulau kecil untuk penumpang dan barang serta mendukung keterbukaan isolasi wilayah dan mendukung kelancaran distribusi barang produksi dari tiap pulau - pulau kecil yang ada di tiap wilayah :

- 1) Mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan antar pulau-pulau kecil antar wilayah kabupaten/kota dan menghubungkan daerah produksi hasil bumi dengan simpul-simpul transportasi pada daerah yang lebih maju
- 2) Menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana angkutan kapal penyeberangan yang disesuaikan dengan daya angkut dan daya muat penumpang dan barang pada lalu lintas penyeberangan lintas pulau
- 3) Membangun dermaga penyeberangan serta fasilitas pendukungnya dan mengarahkan pola pengembangan kawasan dermaga, termasuk dermaga/terminal terpadu
- 4) Mengupayakan dan memantapkan keterpaduan layanan penyeberangan dengan moda lain seperti jalan dan terminal.

E. ARAH PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSPORTASI WILAYAH

Pengembangan transportasi wilayah diorientasikan pada upaya penyeimbangan antara permintaan jasa transportasi dengan penyediaan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi.

Pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi dilakukan dengan memperhatikan aspek :

- a. Komersial
- b. Keperintisan
- c. Keselamatan
- d. Keunggulan masing - masing moda transportasi sesuai dengan kondisi geografis, kependudukan dan sumber daya alam yang diarahkan untuk mengintegrasikan dan mengkombinasikan moda yang ada baik transportasi jalan, penyeberangan, laut dan udara sesuai dengan potensi wilayah.

Dari sisi geografis, Nusa Tenggara Timur terdiri atas pulau besar dan kecil. Pengembangan jaringan transportasi wilayah diarahkan untuk penyediaan pelayanan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dalam bentuk transportasi antar moda dalam pulau dan antar pulau.

Dari sisi demografi, pengembangan jaringan transportasi wilayah antar moda diarahkan untuk penyediaan pelayanan yang disesuaikan dengan kepadatan penduduk yang terbagi dalam dua kategori yaitu kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Dari sisi sumber daya alam, pengembangan jaringan transportasi wilayah harus mempertimbangkan moda transportasi yang lebih efektif dan efisien seperti angkutan hasil pertambangan dan perkebunan dengan kendaraan barang berkapasitas khusus dengan lintasan khusus.

F. PROGRAM

Program pengembangan jaringan transportasi di Propinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan dalam rangka mengembangkan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi nasional dan wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terbagi dalam beberapa tahapan (*milestones*) yaitu; jangka pendek (2014-2019), jangka menengah (2014-2024) dan jangka panjang (2014-2034).

Program-program pengembangan tersebut meliputi bidang transportasi antarmoda/multimoda, transportasi jalan, transportasi penyeberangan, transportasi laut dan transportasi udara yang secara rinci dilihat pada Tabel 1 sampai dengan 4 dan Peta 1 sampai dengan 3.

Tabel 1 : Program Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN								PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	202- 2025	2026- 2034			
A	Trayek Angkutan Jalan													
1	Pengembangan Trayek Kupang – Dili dan Kefamenanu - Oekusi	trayek	2										Ditjen Perhub Darat Pemda	Dishub Swasta BUMN
B	Trayek Angkutan Laut													
1	Pengembangan lintasan pelayaran ke Timor Leste dan Australia	lintasan	2										Ditjen Perhub Laut	Pelni Swasta
2	Pengembangan lintasan pelayaran ke outlet wilayah di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua	lintasan	5										Ditjen Perhub Laut	Pelni Swasta
C	Rute Penerbangan													
1	Pengembangan rute penerbangan internasional ke Timor Leste dan Australia	Rute	2										Ditjen Perhub Udara	Swasta BUMN

Tabel 2 : Program Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Nasional Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020- 2025	2026- 2034				
A.	Prasarana Antarmoda																
1	Pengembangan layanan antar moda di Bandara El-Tari	Unit	1				████████████████████							Kemenuhub RI Pemda	PT. AP, Pemda		
2	Pengembangan layanan antar moda di Bandara Surabaya II Nagekeo	Unit	1									████████				Kemenuhub RI Pemda	Pemda
3	Pengembangan layanan antar moda di Bandara Tambolaka	Unit	1				████████████████████							Kemenuhub RI Pemda	Pemda		
4	Pengembangan layanan antar moda di Pelabuhan Tenau, Waingapu, Ende dan Labuan Bajo	Unit	4				████████████████████							Ditjen Perbub Darat	Pelindo, Pemda		

B	Jaringan Jalan dan Terminal												
1	Pengembangan Terminal Tipe A Kupang	Unit	1									Ditjen Perhub Darat	Dishub, Pemda
2	Optimalisasi Terminal tipe A Motoain	Unit	1									Ditjen Perhub Darat	Dishub, Pemda
3	Peningkatan Terminal Nggorang Labuan Bajo menjadi Tipe A												
4	Pengembangan Outlet perbatasan dengan Negara Timor Leste	unit	1									Ditjen Perhub Darat	Dishub, Pemda
5	Pembangunan jalur jalan disekeliling kawasan perbatasan	unit	1									Ditjen Perhub Darat	Hankam, Pemda
C	Alur pelayaran dan Pelabuhan Laut												
1	Optimalisasi dan pengembangan jalur pelayaran perintis	Rute	12									Ditjen Perhub Laut	Pelni, ASDP, Swasta

Tabel 3 : Program Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi Wilayah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Transportasi Antar Moda

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020- 2025	202- 2034			
1	Pengembangan layanan antar moda di Bandara Eltari, Surabaya II Nagekeo dan Tambolaka sebagai bandara utama di Pulau Timor, Flores dan Sumba	Unit	3												Pemda	PT. AP Damri Pemda
2	Pengembangan layanan antar moda di Pelabuhan Tenau, Waingapu, Ende, Labuan Bajo dan Komodo sebagai pendukung kegiatan ekonomi dan pariwisata	Unit	4												Pemda	Pelindo Damri Pemda

2. Transportasi Jalan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020- 2025	202- 2034			
1	Pengembangan jalur akses angkutan umum pada simpul-simpul transportasi terutama yang berkaitan dengan Bandara dan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan	Unit	3												Pemda	Dishub Dinas PU
2	Pengembangan jalur akses angkutan umum pada simpul-simpul kawasan perkotaan	Rute	5												Pemda	Dishub Dinas PU
3	Adanya standard pelayanan minimal angkutan umum untuk AKDP	--	--												Pemda	Dishub

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020- 2025	202- 2034			
4	Peningkatan pelayanan sistim tiket terusan, tiket langganan dan integrasi tiket angkutan umum di terminal dan Bandara	Unit	--												Pemda	Dishub
5	Penyusunan Rencana Jaringan trayek secara menyeluruh	--	--												Pemda	Dishub
6	Menerapkan <i>buy the service</i> untuk angkutan umum perkotaan.	--	--												Pemda	Dishub
7	Memperkenalkan tiket terusan, tiket langganan dan integrasi tiket angkutan umum	--	--												Pemda	Dishub
8	Pengembangan trayek trans Timor, Trans Sumba dan Trans	Trayek	3												Pemda	Dishub

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020- 2025	202- 2034				
	Flores dan sistem <i>buy the service</i>																
9	Integrasi angkutan perdesaan/feeder dengan angkutan perkotaan	--	--													Pemda	Dishub

3. Transportasi Penyeberangan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020- 2025	202- 2034				
1	Peningkatan fasilitas dermaga pada pelabuhan penyeberangan	Unit	16													Ditjen Hubdat	ASDP Dishub
2	Optimalisasi sarana kepelabuhanan	Unit	16													Ditjen Hubdat	ASDP Dishub
3	Penambahan lintasan angkutan penyeberangan antar pulau yang membentuk sabuk	Unit	12													Ditjen Hubdat	ASDP Dishub

2	Peningkatan sarana dan prasarana bandara	Rute	12														Ditjen Perhub Udara	Pemda, BUMN, Swasta
3	Optimalisasi fasilitas bandar udara baik untuk penumpang maupun barang	Rute	12														Ditjen Perhub Udara	Pemda, BUMN, Swasta
4	Penambahan rute angkutan udara perintis	Rute	15														Ditjen Perhub Udara	Pemda, BUMN, Swasta

Tabel 4 : Program Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Wilayah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Transportasi Jalan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT			
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202-2025	2026-2034					
1	Pembangunan dan pengembangan ATCS (<i>Automatic Traffic Control System</i>) terpadu	Unit	5														Ditjen Perhub Darat Pemda	Dishub
2	Penataan on street parking di kawasan perkotaan	Area	30														Pemda	Dishub

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN								PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			202- 2025	2026- 2034
3	Pengembangan kantung-kantong parkir untuk <i>park and ride</i>	Area	10				■	■	■					Pemda	Dishub
4	Fasilitas jalur khusus sepeda di kawasan perkotaan	Km	30				■	■						Pemda	Dishub
5	Penyediaan bus-bus pengumpan (Damri) dari dan menuju Bandara Eltari, Surabaya 2 dan Tambolaka	Unit	18						■	■	■			Pemda	Dishub Damri
6	Peremajaan angkutan AKDP	Unit	50					■	■	■				Pemda	Dishub Damri Swasta
7	Penyediaan dan optimalisasi angkutan bis perintis	Unit	60				■	■	■	■				Ditjen Perhub Darat	Dishub Damri
8	Pengembangan jalur lintas barang (<i>hub dan spoke</i>)	Lintasan	5				■	■	■	■				Ditjen Perhub Darat	Dishub

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202- 2025	2026- 2034			
9	Optimalisasi Ruas Jalan Strategis Nasional Di Kabupaten Flores Timur, di ruas jalan Wailebe - Waiwadan - Kolilanang - Sagu - Waiwuring di Pulau Adonara.	Km	72,5												Ditjen Perhub Darat	Dinas PU Dshub
10	Optimalisasi Ruas Jalan Strategis Nasional Di Kabupaten Lembata, meliputi ruas Lewoleba - Balauring	Km	52												Ditjen Perhub Darat	Dinas PU Dishub
11	Optimalisasi Ruas Jalan Strategis Nasional Di Kabupaten Alor Ruas jalan	Km	29												Ditjen Perhub Darat	Dinas PU Dishub

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202- 2025	2026- 2034			
	Baranusa – Kabir di Pulau Pantar															
12	Optimalisasi Ruas Jalan Strategis Nasional di Pulau Timor yang meliputi Ruas jalan Batuputih – Panite – Kalbano – Oinlasi – Boking – Wanibesak – Besikama – Webua – Motamasin – Batas Timor Timur di Pulau Timor;	Km	74,6												Ditjen Perhub Darat	Dinas PU Dishub
13	Optimalisasi Ruas Jalan Strategis Nasional Di Kabupaten Kupang meliputi Ruas jalan yang menghubungkan	Km	45												Ditjen Perhub Darat	Dinas PU Dishub

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202- 2025	2026- 2034			
	titik tengah ruas jalan Bolok – Tenau dengan Sp. Lap. Terbang															
14	Optimalisasi Ruas Jalan Strategis Nasional di Pulau Sabu meliputi Ruas jalan Mesara – Seba – Bolow	Km	37,5												Ditjen Perhub Darat	Dinas PU Dishub
15	Optimalisasi Ruas Jalan Strategis Nasional di Pulau Rote meliputi Ruas jalan Batutua – Baa – Pantebaru – Papela – Eakun di Pulau Rote;	Km	42,5												Ditjen Perhub Darat	Dinas PU Dishub

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN								PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			202- 2025	2026- 2034
16	Optimalisasi Ruas Jalan Strategis Nasional di Pulau Flores meliputi Ruas jalan Nggorang - Kondo - Hita - Kendidi dan ruas jalan yang menghubungkan Reo - Pota - Waikelambu - Riung - Mboras - Danga - Nila - Aeram - Kaburea - Nabe - Ronokolo - Maurole - Kotabaru - Koro - Magepanda - Maumere	Km	512,5											Ditjen Perhub Darat	Dinas PU Dishub
17	Optimalisasi ruas jalan Strategis nasional di pulau Sumba meliputi Ruas jalan yang menghubungkan	Km	115,5											Ditjen Perhub Darat	Dinas PU Dishub

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202- 2025	2026- 2034			
	Waingapu – Melolo – Ngalu – Baing															
18	Pemeliharaan ruas jalan nasional yang merupakan jalan lintas di Pulau Flores meliputi ruas jalan Labuan Bajo – Malwatar, Malwatar – Bts Kota Ruteng, Jln Komodo (Kota Ruteng), Bts Kota Ruteng – Km 210, Jln A. Yani (Kota Ruteng), Jln Ranaka (Kota Ruteng), Km 210 – Bts Kab. Manggarai, Bts Kab. Manggarai – Sp. Bajawa, Bts Kota Bajawa – Malanuza, Jl. Gatot Subroto	Km	502,25												Ditjen Perhub Darat	Dinas PU Dishub

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202- 2025	2026- 2034		
	(Bajawa), Jl. A.Yani (Bajawa), Jl. Soekarno- Hatta (Bajawa), Malanuza – Gako, Gako – Aegela, Aegela – Bts Kota Ende, Jl. Arah Bajawa (Ende), Jl. Perwira (Ende), Jl. Soekarno (Ende), Jl. Katedral (Ende), Bts Kota Ende – Detusoko, Jl. A. Yani (Ende), Jl. Gatot Subroto (Ende), Detusoko – Wologai, Wologoi – Junction, Junction – Wolowaru, Wolowaru – Lianunu, Lianunu – Hepang, Hepang – Nita, Nita –														

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202- 2025	2026- 2034		
	Woloara, Woloara - Bts Kota Maumere, Jl. Gajahmada (Maumere), Jl. Nongmeak (Maumere), Jl. Sugiy Pranoto (Maumere), Jl. Kontercius (Maumere), Bts Kota Maumere - Waepare, Jl. A. Yani (Maumere), Waepare - Km 180, Km 180 - Waerunu, Waenuru - Bts Kota Larantuka, Jl. Basuki Rahmat (Larantuka), Jl. Hermanfernandes (Larantuka), Jl. Yoakim Bl. Derosari (Larantuka), Jl. Renha Rosari														

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202- 2025	2026- 2034			
	(Larantuka), Jl. Yos Sudarso (Larantuka);															
19	Pemeliharaan ruas jalan nasional yang merupakan jalan lintas di Pulau Timor meliputi ruas jalan Bolok - Tenau, Jl. Ke Tenau (Kupang), Jl. Tua Bata (Kupang), Jl. Pahlawan (Kupang), Jl. Soekarno (Kupang), Jl. A.Yani (Kupang), Jl. Siliwangi (Kupang), Jl. Sumba - Sumatera (Kupang), Jl. Timor - Timur (Kupang), Simpang Oesapa - Lap.Terbang	Km	225,4												Ditjen Perhub Darat	Dinas PU Dishub

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202- 2025	2026- 2034		
	Eltari, Jl. Raya Eltari, Oesapa – Oesao, Oesao – Bokong, Bokong – Batuputih, Batuputih – Bts Kota Soe, Jl. Gajahmada (Soe), Jl. Sudirman (Soe), Bts Kota Soe – Niki-niki, Jl. Diponegoro (Soe), Jl. A. Yani (Soe), Niki-niki – Noelmuti, Noelmuti – Bts Kota Kefamenanu, Jl. Pattimura (Kefamenanu), Jl. Kartini (Kefamenanu), Jl. Eltari (Kefamenanu), Jl. Basuki Rahmat (Kefamenanu), Bts Kota Kefamenanu –														

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202- 2025	2026- 2034			
	Maubesi, Jl. A. Yani (Kefamenanu), Maubesi – Nesam (Kiupukan), Nesam (Kiupukan) – Halilulik, Halilulik – Bts Kota Atambua, Jl. Suprpto (Atambua), Jl. Supomo (Atambua), Jl. M.Yamin (Atambua), Jl. Basuki Rahmat (Atambua), Bts Kota Atambua – Motaain, Jl. Martadinata (Atambua), Jl.Yos Sudarso (Atambua).															
20	Pemeliharaan ruas jalan Nasional dengan fungsi sebagai	Km	1024,52												Dinas PU	Dishub

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202- 2025	2026- 2034		
	jalan Kolektor Primer, meliputi ruas jalan : 1. Jalan Lintas Pulau Flores pada ruas jalan Bts Kota Ruteng – Reo – Kendidi, Jl. Mutang Rua (Ruteng), Jl. Wae Cees (Ruteng), dan Jl. Satar Tacik (Ruteng); 2. Jalan Lintas Pulau Timor pada ruas jalan Bts Kota Kefamenanu – Oelfaub, Jl. Diponegoro (Kefamenanu), Jl. Sukarno (Kefamenanu), dan Jl. Ketumbar (Kefamenanu);														

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202- 2025	2026- 2034		
	3. Jalan Lintas Pulau Sumba meliputi ruas jalan Waikelo – Waitabula/ Tambolaka, Waitabula/ Tambolaka – Bts Kota Waikabubak, Jl. Sudirman (Waikabubak), Bts Kota Waikabubak – Bts Kab. Sumba Timur, Bts Kab. Sumba Timur – Km 35, Km 35 – Bts Kota Waingapu, Jl. Suprpto (Waingapu), Jl. Panjaitan (Waingapu), Jl. MT.Haryono (Waingapu), Jl. A. Yani														

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202- 2025	2026- 2034		
	(Waingapu), Jl. Diponegoro (Waingapu), Jl. Gajahmada (Waingapu), Jl. Adam Malik (Waingapu), Jl. Matawi Amahul (Waingapu), dan Jl. Nansa Mesi (Waingapu); dan 4. Jalan Lintas Pulau Alor meliputi ruas jalan Bts Kota Kalabahi – Taramana, Jl. Kartini (Kalabahi), Jl. Dewi Sartika (Kalabahi), Jl. Sudirman (Kalabahi), Jl. Panglima Polim														

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202- 2025	2026- 2034		
	(Kalabahi), Jl Gatot Subroto (Kalabahi), Jl. Samratulangi (Kalabahi), Jl. Pattimura (Kalabahi), Taramana – Lantoka – Maritaing, dan Junction - Lapangan Terbang Mali.														
21	Pemeliharaan ruas jalan Propinsi dengan fungsi sebagai jalan Kolektor Primer, meliputi ruas: 1. jaringan jalan yang ada di Pulau Timor, meliputi ruas jalan Oelmasi – Amarasi, Oelmasi – Sulamu –	Km	948,44											Dinas PU	Dishub

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202- 2025	2026- 2034		
	Amfoang Utara - Oepoli, Takari - Amfoang Utara, Oepoli - Eban - Kefamenanu, Batu Putih - Amanuban Selatan., Amanuban Tengah - Boking, Amanatun Selatan - Amanatun Utara, Soe - Mollo Utara, Kefamenanu - Napan, Kefamenanu - Wini - Biboki Anleu - Atapupu, Atambua - Lamaknen - Haekesak, dan Malaka Tengah														

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202- 2025	2026- 2034		
	- Boking - Kolbano - Amanuban Selatan - Amarasi - Kupang Barat (Selatan Timor); 2. jaringan jalan yang ada di Pulau Sumba, meliputi ruas jalan Waitabula (Tambolaka) - Kodi Utara - Kodi - Lamboya - Wanokaka - Waikabubak - Loli - Mamboro, Waingapu - Umalulu - Rindi - Wula Waijelu - Ngadu Ngala - Karera -														

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202- 2025	2026- 2034		
	Tabundung – Katala Hamu Lingu, dan Waingapu – Kambaera – Matawai La Pawu – Paberiwai; 3. jaringan jalan yang ada di Pulau Flores, meliputi ruas jalan Maumere – Magepanda – Maurole – Wewaria – Aesesa – Riung – Sambu Rampas – Reok – Labuan Bajo (Flores Utara), Ende – Wewaria, Aesesa – Boawae – Mauponggo – Golewa, Bajawa –														

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202- 2025	2026- 2034		
	Wolomese – Riung, Satar Mese – Langke Rembong – Cibal – Reok, dan Nanggalili – Lembor; 4. jaringan jalan yang ada di Pulau Rote, yaitu ruas jalan Batutua – Ba’a – Papela; 5. jaringan jalan yang ada di Pulau Alor, yaitu ruas jalan Kalabahi – Alor Barat Daya; 6. jaringan jalan yang ada di Pulau Lembata, yaitu ruas jalan Nubatukan – Buyasuri dan														

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202- 2025	2026- 2034			
	Nubatukan – Atadei; dan 7. jaringan jalan yang ada di Pulau Sabu, yaitu ruas jalan Sabu Timur – Sabu Barat – Hawu Mehara.															
22	Pembangunan Jalan khusus pada kawasan perbatasan : 1. Ruas jalan Wini – Maubesi – Sakato – Wini – Atapupu; 2. Ruas Mota'ain – Atapupu – Atambua; 3. Napan – Kefamenanu; 4. Motamasin – Halilulik; 5. Haekesak – Atambua;	Km	168,2											Hankam Dinas PU	Dishub Badan Perbatasan	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202- 2025	2026- 2034			
	6. Ba'a – Papela; 7. Kalabahi – Taramana- Maritaing; 8. Seba – Bollow; dan 9. Haumeni Ana – Soe.															
23	Optimalisasi terminal Penumpang Tipe B di : 1. Waingapu di Kab. Sumba Timur 2. Soe di Kab. Timor Tengah Selatan 3. Ruteng di Kabupaten Manggarai 4. Kefamenanu di Kab. TTU, 5. Ende di Kabupaten Ende	Unit	5											Dinas Perhubungan	Dishub	

2. Transportasi Penyeberangan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202- 2025	2026- 2034			
1	Pemisahan antara Pelabuhan Laut dengan Pelabuhan Penyeberangan : 1. Waingapu, 2. Seba, 3. Atapupu, 4. Lewoleba, 5. Baranusa, 6. Waiwerang, 7. Balauring, 8. Maumbawa, 9. Mborong.	Unit	9												Ditjen Perhubungan Laut Ditjen Perhubungan Darat	Dishub ASPD
2	Optimalisasi pelayanan pelabuhan penyeberangan yang telah memiliki fasilitas dermaga dan movable bridge : 1. Bolok Kupang (Timor);	Unit	7												Ditjen Perhubungan Darat	Dishub ASPD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202- 2025	2026- 2034		
	2. Pantai Baru (Rote); 3. Waibalun – Larantuka (flores Timur); 4. Kalabahi (Alor); 5. Labuan bajo (flores Barat/Manggarai Barat); 6. Aimere (flores Selatan/Ngada); 7. Nangakeo Ende (Flores Selatan).														
3	Pembangunan fasilitas dermaga dan kelengkapannya pada pelabuhan penyeberangan sebagai penghubung antar pulau kecil (Pantar, Semau, Semau, Alor,	Unit	9											Ditjen Perhubungan Darat	Dishub ASPD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202- 2025	2026- 2034			
	Lembata, Adonara, Solor, Komodo, Rinca, Sabu dan Raijua).															

3. Transportasi Laut

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020- 2025	202- 2034			
1	Pengembangan pelabuhan yang berfungsi sebagai inlet-outlet point utama bagi sistem pergerakan penumpang dan barang menuju dan dari wilayah Nusa Tenggara Timur; Pelabuhan Tenau	Unit	1												Ditjen Perhub Laut	Pelindo
2	Perluasan Lapangan Peti Kemas Pelabuhan Tenau	Ha	2,5												Ditjen Perhub Laut	Pelindo

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020- 2025	202- 2034			
3	Penambahan Fasilitas Bongkar Muat Peti Kemas Container crane (CC) dan rubber tyred gantry (RTG)	Unit	3												Ditjen Perhub Laut	Pelindo
4	Pengembangan pelabuhan-pelabuhan pengumpan dan pengumpul: 1. Pelabuhan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur; 2. Pelabuhan Maumere di Kabupaten Sikka; 3. Pelabuhan Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara; 4. Pelabuhan Ippi di Kab.	Unit	13												Ditjen Perhub Laut	Dishub, Pelindo

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020- 2025	202- 2034			
	Ende;															
	5. Pelabuhan Larantuka di Kabupaten Flores Timur;															
	6. Pelabuhan Waiwadan di Kabupaten Flores Timur;															
	7. Pelabuhan Atapupu di Kabupaten Belu;															
	8. Pelabuhan Maritaing di Kabupaten Alor;															
	9. Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;															
	10. Pelabuhan Ba'a di Kabupaten Rote N'dao;															
	11. Pelabuhan Seba di															

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020- 2025	202- 2034			
	Kabupaten Sabu Raijua; 12. Pelabuhan Marapokot di Kabupaten Nagekeo; 13. Pelabuhan Waikelo di Kabupaten Sumba Barat Daya															
5	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan yang terintegrasi dengan sarana transportasi darat : 1. Pelabuhan Tenau 2. Pelabuhan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur; 3. Pelabuhan Maumere di Kabupaten Sikka;	Unit	14												Ditjen Perhub Laut	Dishub, Pelindo

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020- 2025	202- 2034			
	4. Pelabuhan Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara;															
	5. Pelabuhan Ippi di Kab. Ende;															
	6. Pelabuhan Larantuka di Kabupaten Flores Timur;															
	7. Pelabuhan Waiwadan di Kabupaten Flores Timur;															
	8. Pelabuhan Atapupu di Kabupaten Belu;															
	9. Pelabuhan Maritaing di Kabupaten Alor; dan															
	10. Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai															

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020- 2025	202- 2034		
	Barat. 11. Pelabuhan Ba'a di Kabupaten Rote Ndao; 12. Pelabuhan Seba di Kabupaten Sabu Raijua; 13. Pelabuhan Marapokot di Kabupaten Ngada; 14. Pelabuhan Waikelo di Kabupaten Sumba Barat Daya														
6	Pengembangan Pelabuhan/ Termi nal khusus : a. Pelabuhan Pertamina di Kabupaten Kupang yang merupakan pelabuhan	Unit	1											Dishub	Dishub Pertamin a

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020- 2025	202- 2034			
	khusus minyak/energi yang berfungsi sebagai pelabuhan distribusi/transit bahan bakar;	Unit	14													
	b. Pelabuhan rakyat yang tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur yang berfungsi sebagai pelabuhan khusus perikanan;	Unit	1													
	c. Pelabuhan terpadu di Kabupaten Sumba Tengah yang direncanakan dibangun dalam rangka															

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020- 2025	202- 2034			
	pengembangan ekonomi dengan fungsinya: nelayan, wisata dan pelabuhan umum;															
7	Meningkatkan persinggahan kapal Pelni ke pelabuhan-pelabuhan yang selama ini belum dapat disinggahi, dikarenakan kondisi pelabuhannya belum mendukung	Unit	14												Ditjen Perhub Laut	Pelindo Pelni Swasta
8	Meningkatkan peran pelabuhan untuk mendukung kegiatan ekspor-impor dengan prioritas pada pelabuhan yang	Unit	14												Ditjen Perhub Laut	Pelindo

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020- 2025	202- 2034			
	telah mempunya interaksi/ hubungan kuat dengan pelabuhan di Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua															
9	Peningkatan Pelabuhan Waingapu (Sumba Timur) sebagai pelabuhan yang melayani pengiriman ternak ke Pulau Jawa juga sebagai pusat kegiatan ekspor kopra dan kopi serta hasil bumi lainnya	Unit	1												Ditjen Perhub Laut	Pelindo
10	Peningkatan Pelabuhan Atapupu untuk	Unit	1												Ditjen Perhub Laut	Pemda

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020- 2025	202- 2034			
	membantu ekspor ke Kawasan Timur (Maluku), terutama hasil pertanian dan ternak															
11	Peningkatan Pelabuhan Maumere (Kabupaten Sikka) sebagai pelabuhan Nasional, untuk membantu pengiriman hasil produksi dari bagian utara Ende dan Ngada terutama hasil perkebunan, perikanan laut sebelum dikirim ke Pulau Jawa	Unit	1												Ditjen Perhub Laut	Pelindo Pemda

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020- 2025	202- 2034			
12	Peningkatan Pelabuhan Ippi (Ende) menjadi Pelabuhan Nasional untuk ekspor ke luar Provinsi Nusa Tenggara Timur	Unit	1												Ditjen Perhub Laut	Pelindo Pemda
13	Peningkatan Pelabuhan Reo (Kabupaten Manggarai) menjadi Pelabuhan Nasional yang bisa lebih akses ke Surabaya dan Makasar	Unit	1												Ditjen Perhub Laut	Pemda
14	Peningkatan Pelabuhan Labuanbajo sebagai Pelabuhan Nasional yang dapat untuk penunjang	Unit	1												Ditjen Perhub Laut	Pemda

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020- 2025	202- 2034			
	kegiatan pariwisata di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur															
15	Peningkatan Pelabuhan Wini (Kabupaten TTU) sebagai pelabuhan Nasional	Unit	1												Ditjen Perhub Laut	Pemda
16	Peningkatan rute pelayaran Nusantara yang dilayani Kapal Laut yang dikelola oleh PT. Pelni	Rute	8												Ditjen Perhub Laut	Pelni Pemda Swasta
17	Peningkatan Rute Pelayaran Kapal Perintis yang melayani rute Waingapu, Sabu, Kupang, Larantuka, Kalabahi dan Ba'a	Rute	12												Ditjen Perhub Laut	Pelni Swasta Pemda

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020- 2025	202- 2034			
18	Peningkatan Rute Pelayaran Kapal Ferry melayani Rote, Sabu, Larantuka, Kalabahi, Aimere, Ende, Waingapu, Lewoleba, Atapupu dan Baranuasa	Rute	30												Ditjen Perhub Darat	ASDP Pemda Swasta

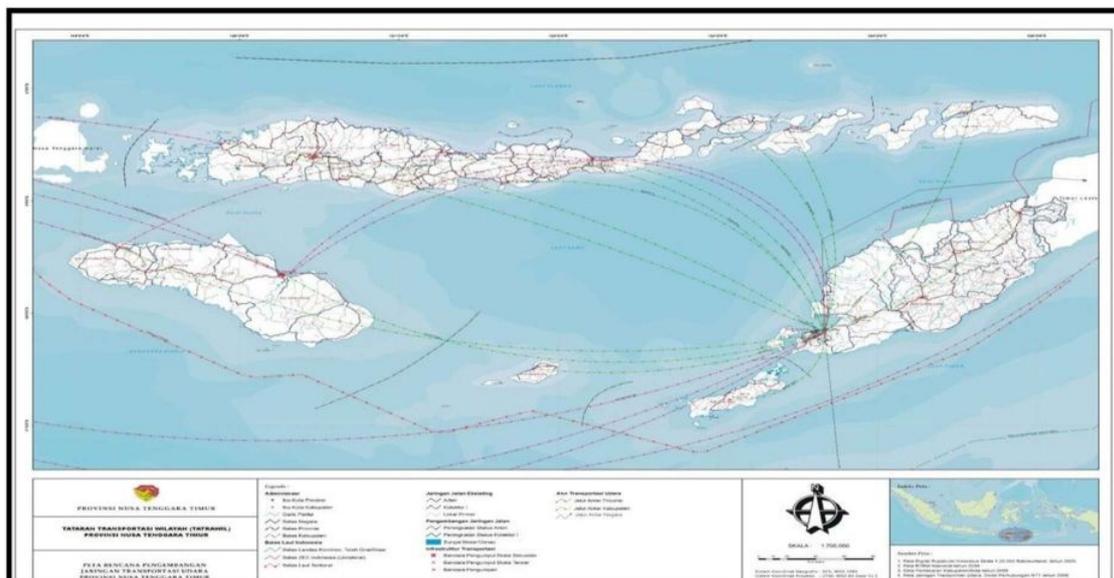
4. Transportasi Udara

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202- 2025	202- 2034			
1	Bandara Eltari Perluasan apron hingga dapat menampung 20 pesawat	Ha	2,5												Ditjen Perhub Udara	PT. AP. Dishub
2	Bandara Tambolaka Perpanjangan Runway menjadi 2500 m	Meter	2500												Ditjen Perhub Udara	Dishub

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202- 2025	202- 2034			
3	Perpanjangan Runway di Bandara DC. Saudale, Terdamu, Gewayantana, Wonopito dan A.A. Bere Talo	Meter	1800			██████████									Ditjen Perhub Udara	Dishub
4	Pengembangan dan dan optimalisasi Bandara Komodo sebagai bandara pengumpan dan gerbang wisata	Unit	1			██████████									Ditjen Perhub Udara	Dishub
5	Pembangunan Bandara Surabaya II sebagai bandara pengumpan	Unit	1									██████████		Ditjen Perhub Udara	Dishub	
6	Peningkatan pelayanan Bandara El Tari sebagai bandara internasional	Unit	1			██								Ditjen Perhub Udara	Dishub	
7	Relokasi Bandara Terdamu di Sabu	Unit	1			██							Ditjen Perhub Udara	Dishub		

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202- 2025	202- 2034			
	Rajjua															
8	Pengembangan Bandara H.H. Aroeboesman di Ende	Unit	1												Ditjen Perhub Udara	Dishub
9	Pengembangan Bandara Frans Seda di Sikka	Unit	1												Ditjen Perhub Udara	Dishub
10	Pembangunan Bandara Kabir di Pulau Pantar	Unit	1												Ditjen Perhub Udara	Dishub
11	Pembangunan Bandara Tanjung Bendera di Manggarai Timur	Unit	1												Ditjen Perhub Udara	Dishub
12	Pembangunan Bandara Adonara di Pulau Adonara	Unit	1												Ditjen Perhub Udara	Dishub
13	Relokasi Bandara El-Tari Kupang	Unit	1												Ditjen Perhub Udara	PT.AP Dishub

Peta 3 : Peta Pengembangan Jaringan Transportasi Udara di Provinsi NTT Tahun 2014-2034



BAB IV PENUTUP

Sebagai perwujudan dari Sistranas, maka pengembangan transportasi pada tataran wilayah diorientasikan kepada upaya pengembangan keseimbangan antara penyediaan jaringan prasarana dan pelayanan dengan permintaan jasa transportasi (*supply dan demand*) yang mendukung MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dengan memperhatikan *potential demand* serta memperhatikan kebutuhan jasa transportasi bagi masyarakat yang terisolir dalam upaya meningkatkan perekonomian wilayah.

Berhasilnya pelaksanaan Sistranas pada Tatravil secara konsekuen dan penuh tanggung jawab, sangat tergantung kepada sumber daya manusia dan partisipasi seluruh masyarakat dan berbagai sektor terkait lainnya serta seluruh aparaturnya transportasi baik di provinsi, maupun kabupaten/kota.

Dokumen Tatravil ini merupakan pedoman yang digunakan dalam pengembangan jaringan transportasi wilayah secara terintegrasi oleh para stakeholder dalam kurun waktu tahun 2014-2034.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA